

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Asep Nanda Paramayana, Riana Rachmawati Dewi, Agni Astungkara 2022	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada DPRD Kota Surakarta)	Penelitian ini dibuktikan dengan hasil penyampaian laporan keuangan yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada DPRD Kota Surakarta. Aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada DPRD Kota Surakarta. Pemantauan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di DPRD Kota Surakarta.
2	Fernanda Alivia Defana, Sri Rahayu 2021	Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil subtest, sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, namun kualitas pelaporan keuangan dan aksesibilitas pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3	Menrokis Purba, Restu	Penyajian Laporan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Agusti, Rofika Rofika 2021	Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4	Nispa Sari, Tyara Sari, Rifqa Ayu Dasila 2023	Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada OPD Kota Palopo	Kami menunjukkan bahwa aksesibilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan, namun pengendalian intern berpengaruh positif terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
5	Zeny Antika, Yunika Murdayanti, Hafifah Nasution 2020	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kami menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas pelaporan keuangan, dan pengendalian internal mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
6	Ni Luh Wulan Artini, I Putu Deddy Samtika Putra 2020	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil subtest, sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	keuangan daerah, namun kualitas pelaporan keuangan dan aksesibilitas pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
7	Alifia Ulfa Rosalia, Sri Rahayu 2020	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan terkadang mempunyai pengaruh positif yang signifikan, dan aksesibilitas laporan keuangan terkadang mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas administrasi keuangan daerah.
8	Mawaddah, Murhaban, Dewi Keumala Sari 2019	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (pada SKPD di Lhokseumawe).	Hasil survei sebanyak item. Penyajian laporan keuangan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan mempunyai dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah. Sementara itu, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan,

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Loksmawe.

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Teori Signalling

Teori signalling menurut (Houston, 2014) merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajemen lembaga untuk memberi sinyal kepada masyarakat tentang informasi kinerja keuangan lembaga di masa yang akan datang dan disampaikan melalui laporan akuntansi. Dalam hal ini, informasi yang disampaikan manajemen akan meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan lembaga. Menurut Putri (2018) teori signalling merupakan penerapan ilmu akuntansi untuk menghasilkan laporan akuntansi yang digunakan sebuah organisasi untuk memberikan sinyal kepada masyarakat. Laporan akuntansi yang relevan, andal, dan tepat waktu akan digunakan oleh masyarakat sebagai dasar untuk mengambil sebuah keputusan. Berdasarkan pengertian teori signalling dari beberapa referensi di atas dapat disimpulkan bahwa teori signalling adalah pengungkapan informasi secara sukarela atas kinerja manajemen berupa laporan keuangan yang digunakan untuk memberikan sinyal yang positif kepada pihak pemakai 11 informasi laporan keuangan dan meningkatkan kredibilitas sebuah organisasi.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut (Mudjiyono, 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian proses dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan, serta mengawasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan atas program dan kebijakan pemerintah daerah untuk dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat secara jujur dan sesuai dengan kebijakan hukum.

Menurut (Superdi, 2017) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kewajiban organisasi untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan daerah kepada publik. (Bastian, 2010) akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melibatkan kewajiban organisasi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan transparansi, memenuhi tanggung jawabnya, dan memberikan pertanggungjawaban kepada publik dan pihak yang berwenang.

b. Fungsi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2021a) memiliki 3 fungsi yaitu:

1. Sebagai alat kontrol demokrasi

Akuntabilitas memainkan peran penting sebagai alat kontrol yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pejabat publik dan memilih mereka yang dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel.

2. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan jabatan

Akuntabilitas dapat mencegah korupsi dan penyalahgunaan jabatan dengan menerapkan pengendalian internal, laporan keuangan yang diperiksa secara independen, dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang transparan.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas

Akuntabilitas membantu meningkatkan efisiensi operasional melalui perbaikan terus-menerus, seperti digitalisasi dan benchmarking dengan instansi pemerintah yang efisien. Selain itu, akuntabilitas juga berkontribusi pada peningkatan efektivitas kegiatan yang memberikan nilai tambah dalam pelayanan publik.

Dengan menerapkan akuntabilitas, pemerintah dan instansi publik dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan mereka, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat

c. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut (Negara et al., 2000) prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dari prinsip prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat disimpulkan bahwa Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi dapat bertanggung jawab secara efektif, efisien, dan transparan dalam pengelolaan sumber daya serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

d. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap objek atau kejadian tertentu. Variabel ini, menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 item pernyataan dan menggunakan skala likert dan memberikan skor dari jawaban responden yakni : (1) sangat

tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral atau kurang setuju, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Indikator variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) dalam penelitian ini mengacu pada aspek penelitian yang telah dilakukan oleh (Nurmuthmainnah, 2015) yaitu:

Tabel 2.2 indikator variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Variabel	Sumber	Indikator	Sumber Data
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	(Nurmuthmainnah, 2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Akuntabilitas Kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik 2) Akuntabilitas Proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. 3) Akuntabilitas Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal 4) Akuntabilitas Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. 	Pemimpin dan Pengawas

3. Aksesibilitas Laporan Keuangan

a. Pengertian Aksesibilitas Laporan Keuangan

Pengertian aksesibilitas (*accessibility*) dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2021b)

Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya (Daerah et al., 2011).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aksesibilitas laporan keuangan sangat penting dalam mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Aksesibilitas mengacu pada kemudahan dan keterbukaan dalam memperoleh informasi laporan keuangan. Secara keseluruhan, aksesibilitas laporan keuangan berperan penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan memastikan informasi keuangan mudah diakses oleh masyarakat, dapat tercipta lingkungan yang lebih terbuka dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan publik.

Keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari (UU RI No. 14 dan 2008) mengenai keterbukaan informasi publik, pada pasal 2 ayat 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Setiap informasi harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Menurut (Sande, 2013) yang sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, pemerintah daerah harus memenuhi beberapa hal yaitu: 1) Keterbukaan, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa 2) Kemudahan, yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada stakeholder dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah 3) Accesible yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (website) (Indonesia, 2006).

b. Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan

Variabel aksesibilitas laporan keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap objek atau kejadian tertentu. Variabel ini, menggunakan kuesioner, ada 10 item pernyataan dan skor dari jawaban responden yakni: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, 4) setuju, dan (5) sangat setuju. Indikator variabel aksesibilitas laporan keuangan (X1) dalam penelitian ini mengacu pada aspek penelitian yang telah dilakukan oleh (Nurmuthmainnah, 2015):

Tabel 2.3 Indikator variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan

Variabel	Sumber	Indikator	Sumber Data
Aksesibilitas Laporan Keuangan	(Sande, 2013)	a. Laporan keuangan dapat diakses b. Laporan keuangan dipublikasikan melalui media umum	Pemimpin dan Pegawai

4. Sistem Pengendalian Internal

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut (Indonesia, 2008) Peraturan Pemerintah No. 60, sistem pengendalian internal adalah proses menyeluruh atas suatu aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan organisasi beserta seluruh pegawai secara konsisten untuk memberikan ketepatan atas tujuan dan aktivitas organisasi yang dijalankan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan secara andal, penjagaan aset daerah, dan mendorong untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

Menurut (Sudiaranti et al., 2015) sistem pengendalian internal adalah proses pemantauan atas suatu aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan organisasi beserta seluruh pegawai secara konsisten dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif dan efisien, mengatasi risiko dalam pencapaian tujuan, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, penjagaan aset daerah, dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Sari dan Azlina, 2017) sistem pengendalian internal adalah suatu prosedur untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi dan mencegah terjadinya kecurangan dengan faktor pendukung sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang memadai.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, organisasi diharapkan dapat mengelola aktivitasnya secara teratur, mengurangi risiko, meningkatkan akurasi informasi, menjaga kepatuhan terhadap aturan, serta mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif dan efisien.

b. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 (Indonesia, 2008) meliputi:

- 1) Lingkungan Pengendalian:
 - a) Menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika
 - b) Melakukan pengawasan yang bertanggung jawab
 - c) Menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab
 - d) Menunjukkan komitmen terhadap kompetensi
 - e) Menegakkan akuntabilitas
- 2) Penilaian Risiko:
 - a) Menentukan tujuan yang sesuai
 - b) Identifikasi dan analisis risiko
 - c) Penilaian risiko atas fraud
 - d) Identifikasi dan analisis perubahan yang signifikan
- 3) Kegiatan pengendalian, sekurang- kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah
 - b) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
 - c) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah
 - d) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan

- f) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk 25 memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- 4) Informasi dan Komunikasi, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:
- a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
 - b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.
 - c) Pemantauan, dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.
- 5) Pemantauan pengendalian intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 dapat dilakukan dengan cara pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya.
- a. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Variabel Sistem Pengendalian Intern dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap objek atau kejadian tertentu. Variabel ini, menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 item pernyataan dan menggunakan skala likert dan memberikan skor dari jawaban responden yakni : (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral atau kurang setuju, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Indikator variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) pada penelitian ini mengacu pada aspek dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 (Indonesia, 2008) yaitu:

Tabel 2.4 Indikator variabel Sistem Pengendalian Internal

Variabel	Sumber	Indikator	Sumber Data
Sistem Pengendalian Internal	(Sudiarianti <i>et al.</i> , 2015)	a. Lingkungan Pengendalian b. Penilaian Risiko c. Kegiatan Pengendalian d. Informasi dan Komunikasi e. Pemantauan	Pemimpin dan Pegawai

C. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah suatu kerangka konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai variabel terikat, dan menggunakan Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel bebas.

Tujuan yang ingin dicapai Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah Kota Probolinggo adalah dapat terwujudnya pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur.

Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim dan Kusufi, 2007). Maka indikator utama dalam menentukan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah yaitu Keterbukaan pertanggung jawaban laporan keuangan suatu badan, sehingga aksesibilitas laporan keuangan di anggap faktor terpenting dalam menentukan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang

untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan suatu badan atau perusahaan. Pemerintah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola dana publik (Dewi dan Mildawati, 2018).

Teori signalling mengemukakan bahwa manajemen lembaga menggunakan laporan keuangan sebagai sarana untuk memberikan sinyal positif kepada masyarakat mengenai kinerja keuangan di masa depan (Houston, 2014). Dalam hal ini, meningkatnya aksesibilitas laporan keuangan, yang mencerminkan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan suatu badan atau perusahaan, diinterpretasikan sebagai pemberian sinyal positif dari pemerintah terkait transparansi dan keterbukaan dalam pertanggungjawaban keuangan. Oleh karena itu, hipotesis 1 mengasumsikan bahwa meningkatnya aksesibilitas laporan keuangan akan meningkatkan persepsi akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah.

Berdasarkan beberapa pendapat yang disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Indikator utama dalam menilai akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah adalah keterbukaan pertanggungjawaban laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan faktor kunci dalam menentukan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah, di mana kemudahan akses informasi terkait laporan keuangan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses yang mudah kepada semua pihak, termasuk lembaga legislatif, badan pengawasan, dan masyarakat, yang merupakan pemangku kepercayaan dalam pengelolaan dana publik.

H1: Aksesibilitas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, sangat dibutuhkan sistem pengendalian intern yang baik. Sistem pengendalian intern merupakan manajemen yang terkordinir

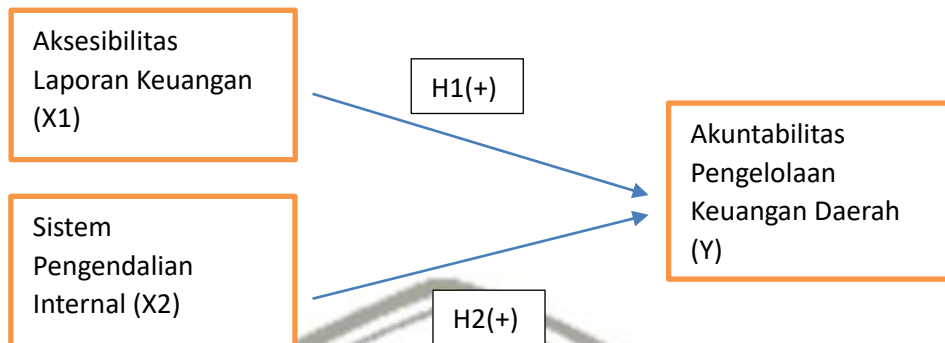
dengan baik untuk menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah, dan menjamin pengamanan aset Negara (Purnomo, 2014).

Hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dapat diartikan bahwa meningkatnya Aksesibilitas laporan keuangan dan diikuti dengan meningkatnya Sistem pengendalian intern, maka secara teori dapat meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah. Karena diasumsikan bahwa badan pemerintahan yang memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan yang baik, jujur, tidak ada yang ditutupi & dirahasiakan dari masyarakat, serta pengelolaan manajemen intern yang baik. Maka akan berdampak baik pula terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

Teori signalling juga mencakup aspek kredibilitas dan keandalan informasi. Penggunaan sistem pengendalian intern yang baik untuk memastikan keandalan laporan keuangan dan data keuangan sesuai dengan teori ini akan memberikan sinyal positif tentang kualitas pengelolaan dan pengendalian dana publik. Oleh karena itu, hipotesis 2 mengasumsikan bahwa meningkatnya sistem pengendalian intern yang baik akan meningkatkan persepsi akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah.

H2: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka teoritis pada penelitian ini dapat diilustrasikan pada bagan berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

